

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN UNCAC
TAHUN 2003 DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Tesis

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh:

**Novely Alfons
NPM : 322015020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
TAHUN
2018**



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298-321212, Fax. 0298-321453
Email: library@adm.uksw.edu; <http://library.uksw.edu>

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novelty Alfons
NIM : 322015020 Email : velcute89@yahoo.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir : Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan UNCAC Tahun 2003 dalam Kaitannya dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing : 1. Dr. Marihot J. Hutajulu, S.H., M.Hum.
2. Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 15 Desember 2018



Novelty Alfons

F-LIB-080



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298-321212, Fax. 0298-321453
Email: library@adm.uksw.edu; <http://library.uksw.edu>

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novely Alfons
NIM : 322015020 Email : velcute89@yahoo.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir : Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan UNCAC Tahun 2003 dalam Kaitannya dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas-Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 15 Desember 2018

Novely Alfons

1956

Mengetahui,

Dr. Marhot J. Hutajulu, S.H., M.Hum.

Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum

F-LIB-081

Lembar Persetujuan

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN
UNCAC TAHUN 2003 DALAM KAITANNYA
DENGAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan Untuk Gelar Magister Hukum

Oleh :

NOVELY ALFONS

322015020

Telah Disetujui Untuk Diuji Tanggal _Bulan November Tahun 2018

Pembimbing I



Dr. Marihot J. Hutajulu, S.H., M.Hum.

1956

Pembimbing II



Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum

Lembar Pengesahan

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN UNCAC
TAHUN 2003 DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

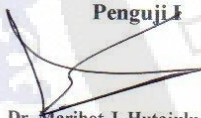
Novely Alfons

NPM : 322015020

Program Studi Magister Ilmu Hukum

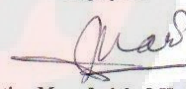
Menyetujui

Penguji I



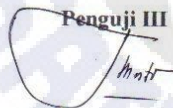
Dr. Marihot J. Hutajulu, S.H., M.Hum.

Penguji II



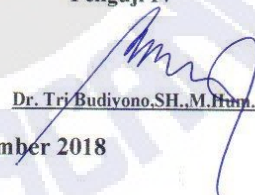
Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum.

Penguji III



Dr. M. Harvanto, S.H., M.Hum.

Penguji IV



Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum.

Diuji pada Tanggal 3 Desember 2018

Mengesahkan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum.

Motto

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.

(Matius 7:7)

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama Puji Syukur dan Terima Kasih saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada saat ini, saya boleh berada di penghujung perkuliahan yang ditandai dengan berhasil diselsaikannya Penelitian dan Penulisan ini sebagai syarat untuk mencapai Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, dan saya mengamini semua itu boleh terjadi hanya karena berkat dan tuntunan dari Tuhan.

Terima kasih kepada Bapak Arie Siswanto S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Terima kasih kepada Dr. Marihot J. Hutajulu, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I, dan kepada Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang selama ini membantu dan memberikan petunjuk serta arahan kepada saya dan hal itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu selama perkuliahan di Fakultas Hukum.

Terima kasih kepada bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang sangat membantu dalam pengurusan setiap administrasi selama saya berkuliah di Fakultas Hukum.

Terima kasih kepada keluarga yang selama ini sudah mendukung saya dalam Doa dan selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tesis.

Terima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah mendukung saya dalam menyelesaikan Tesis.

KATA PENGANTAR

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) yang diikuti Indonesia pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida Meksiko bersama 137 negara lainnya menjadi bukti awal komitmen Indonesia untuk memperbaiki diri melalui pemberantasan korupsi. Dengan keikutsertaan Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 21 maret 2006 yang kemudian diikuti dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ratifikasi *United Nation Convention Againts Corruption* 2003, menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk serius mengimplementasikan konvensi ini.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah berubah 5 kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak memadai. Disahkannya

UNCAC juga tidak begitu saja sanggup mengatasi masalah korupsi yang menggerogoti bangsa ini. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan banyak usaha dan kesungguhan tidak hanya dari institusi penegak hukum namun juga dari seluruh elemen masyarakat, karena pelaksanaan UNCAC tidak hanya tanggung jawab pemerintah namun juga menuntut peran aktif dari sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*).

Tentunya implementasi UNCAC tersebut tidak harus menunggu hingga seluruh peraturan perundangan terharmonisasi dengan UNCAC, karena sebenarnya telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengarah pada pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk itu studi ini berusaha mengidentifikasi kegiatan dan peraturan yang telah dikerjakan Indonesia khususnya peraturan tentang tindak pidana korupsi yang sejalan dengan amanat UNCAC. Meskipun hasil dari berbagai program/kegiatan tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, yang dibuktikan dengan masih terpuruknya Indonesia akibat Korupsi, namun setidaknya hasil studi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi proses harmonisasi perundangan yang sedang berlangsung.

Studi ini diberi judul “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan UNCAC Tahun 2003 dalam Kaitannya dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. Penulisan studi/tesis ini diuraikan dalam 4 (empat) bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II, Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV Penutup. Bab I akan memuat latar belakang

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik kegunaan teoritis maupun praktis, berisi metode penelitian yang didalamnya ada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan hukum, unit analisa, serta sistematika penulisan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan di dalam penulisan tesis ini. Bab II yakni menjabarkan mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, serta Tindak Pidana Korupsi, Dalam Bab III akan menjabarkan Hasil Analisis tentang hasil yang diperoleh dari penelitian, yakni Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Rumusan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Lembaga/organisasi lain, serta melalui Peran Serta Masyarakat. Dan menguraikan hasil pembahasan yakni tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi menurut Konvensi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 dalam kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Salatiga, 16 November 2018

Novely Alfons

Abstrak

Dalam globalisasi ekonomi saat ini, korupsi telah menjadi masalah internasional yang membutuhkan kerjasama dan komitmen dari seluruh negara untuk mengatasinya. Kerjasama, keterbukaan dan komitmen baik dari negara berkembang maupun negara maju dibutuhkan untuk memutuskan rantai korupsi ini. Karenanya, disahkanlah sebuah terobosan peraturan untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni UNCAC (*United Nation Convention Againsts Corruption*) Tahun 2003. Sebagai negara peserta ratifikasi UNCAC sekaligus tuan rumah rumah konferensi ke dua negara peserta UNCAC, Indonesia secara serius mempersiapkan diri dan secara konsisten berusaha mengimplementasikan tujuan UNCAC ini. Hal penting dalam memastikan terselenggaranya percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam mendukung UNCAC adalah memastikan perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang ada saat ini sesuai dengan tujuan UNCAC. Untuk itu, Studi berikut ini, bermaksud melihat dan menganalisis lebih jauh mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang turut mendukung khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi di kaitkan dengan Konvensi UNCAC 2003 tersebut.

Kata Kunci : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, UNCAC (United Nation Convention Againsts Corruption) Tahun 2003, Peraturan Perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL (COVER)	
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 A. Latar Belakang	 1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Jenis Pendekatan	25
3. Bahan Hukum	25
4. Unit Analisa	27
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 30

- A. Tindak Pidana (Kajian Tentang Tindak Pidana)..... 30
- B. Tindak Pidana Korupsi..... 39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Hasil Penelitian.....62
 - 1. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Rumusan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia62
 - 2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Lembaga/organisasi lain, serta melalui Peran Serta Masyarakat.....82
- B. Hasil Pembahasan.....95
 - Pencegahan Tindak Pidana Korupsi menurut Konvensi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) Tahun 2003 dalam kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....95

BAB IV PENUTUP117

- A. Kesimpulan.....117
- B. Saran/Rekomendasi119

DAFTAR PUSTAKA.....121

- A. Bahan Buku.....121
- B. Bahan Perundang-undangan124
- C. Sumber Lainnya (Hasil Penelitian, Kamus, Jurnal Hukum, Artikel).....125

